



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

## PENGUMUMAN

**NOMOR : 12/ PANSEL PENGADAAN PEGAWAI ASN /12/2024  
TENTANG**

### **MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5457/M.SM.01.00/2024 Hal : Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, bersama ini Pansel Pengadaan Pegawai ASN Setjen DPR RI menginformasikan :

1. Daftar Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Setjen DPR RI T.A. 2024 pada Lampiran Pengumuman ini.
2. Peserta dapat mempelajari dan mengenali point penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya.
3. Peserta wajib membaca dan memahami Pengumuman ini, kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggungjawab Peserta.
4. Peserta agar selalu memantau Pengumuman terkait Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2023 melalui <https://www.dpr.go.id/cpns> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.
5. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya/gratis.
6. Peserta, keluarga dan pihak lain agar tidak mempercayai apabila ada oknum/pihak yang tidak bertanggungjawab menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Perbuatan tersebut adalah penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab Pansel CPNS Setjen DPR.
7. Informasi terkait pelaksanaan dan pengaduan seleksi pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2023, selain sebab-sebab ketidakkelulusan dapat menghubungi Call Center Lewat Reformasi (Layanan Informasi Whatsapp Terkini Perencanaan dan Formasi) Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN Setjen DPR RI melalui nomor 081316754256 dan email [cpns@dpr.go.id](mailto:cpns@dpr.go.id) pada hari Senin s.d Kamis pukul 08.30 s.d 15.00 WIB dan hari Jumat pukul 08.30 s.d 15.30 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 10 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
SEKRETARIS JENDERAL

**Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom.**

Lampiran

Nomor : 12/PANSEL PENGADAAN PEGAWAI ASN/12/2024

Tanggal : 10 Desember 2024

**DAFTAR MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPTENSI**

NO	JABATAN	MATERI POKOK
1	Analisis Hukum Ahli Pertama	Kemampuan Umum
		1 Hukum Pidana
		2 Hukum Perdata
		3 Hukum Acara
		4 Hukum Tata Negara
		5 Hukum Internasional
		6 Hukum Administrasi Negara
		7 Hukum Umum
		Kemampuan Khusus
		1 Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan
		2 Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
		3 Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
		4 Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
5 Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan		
6 Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa		
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Kemampuan Analisis:
		1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
		2 Manajemen Kebijakan Publik
		3 Metodologi Riset Kebijakan
		4 Analisis Kebijakan Publik
		5 Dokumentasi Saran Kebijakan
		Kemampuan Politis:
		1 Publikasi Saran Kebijakan
		2 Komunikasi dan Konsultasi Kebijakan
		3 Pemetaan Stakeholder dan Advokasi Kebijakan Publik
3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
		4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		Kemampuan Khusus:
		1 Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur
		2 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
		3 Pengadaan ASN
		4 Pangkat dan Jabatan ASN
		5 Pengembangan Karier ASN

NO	JABATAN	MATERI POKOK	
		6	Pola Karier ASN
		7	Promosi ASN
		8	Mutasi ASN
		9	Penugasan ASN
		10	Pengembangan Kompetensi ASN
		11	Penilaian Kinerja ASN
		12	Disiplin ASN
		13	Penghargaan ASN
		14	Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN
		15	Pemberhentian ASN
		16	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
		17	Perlindungan ASN
		18	Cuti ASN
		19	Sistem Informasi ASN
		20	Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas
		21	Struktur/kelembagaan/tata laksana/ proses bisnis unit kerja/instansi
		22	Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi
		23	Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur
		19	Sistem Informasi ASN
		20	Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas
		21	Struktur/kelembagaan/tata laksana/ proses bisnis unit kerja/instansi
		22	Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi
		23	Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur
4	Arsiparis Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan
		2	Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan
		3	Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
		4	Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
			Kemampuan Khusus:
		1	Konsep dan teori tentang arsip dinamis
		2	Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
		3	Konsep dasar penyusutan arsip
		4	Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan
		5	Konsep dan teori tentang arsip statis
		6	Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis
		7	Preservasi arsip statis
		8	Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis
		9	Standar Operasional Prosedur Kearsipan
		10	Penilaian kinerja Arsiparis
		11	Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN
5	Arsiparis Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Konsep dan teori tentang kearsipan
		2	Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan
			Kemampuan Khusus:
		1	Teori dasar pengelolaan arsip dinamis
		2	Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip dinamis
		3	Penciptaan arsip
		4	Pemberkasan arsip aktif
		5	Penataan arsip inaktif
		6	Teori dasar pengelolaan arsip statis
		7	Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip statis
		8	Restorasi arsip
		9	Pameran arsip
		10	Teori dasar pembinaan kearsipan

NO	JABATAN	MATERI POKOK	
		11	Peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan
		12	Bimbingan teknis kearsipan
6	Pamong Budaya Terampil	1	Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
		2	Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		3	Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
		6	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2027 tentang Pemajuan Kebudayaan
		7	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		8	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda
		9	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
		10	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
		11	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
		12	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
		13	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		14	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasinal Cagar Budaya
7	Penata Keprotokolan		Kemampuan Umum: 1 Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Negara dalam layanan keprotokolan dalam peraturan perundang-undangan 2 Pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan peraturan perundang-undangan 3 Pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan yang berkaitan dengan administrasi/protokol berdasarkan peraturan perundang-undangan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan keprotokolan terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan 2 Pelayanan keprotokolan terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan 3 Pelayanan keprotokolan terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan 4 Pelayanan keprotokolan terkait tata cara Protokol Internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan 5 Protokol Kepresidenan dan Pejabat Negara/Presiden/Pemerintah lainnya
8	Penerjemah Ahli Pertama-Penerjemah Bahasa Inggris		Kompetensi Umum: Teori Penerjemahan Kompetensi Khusus: 1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia 2 Membaca teks Bahasa Indonesia 3 Struktur Bahasa Inggris dan ungkapan tulis Bahasa Inggris 4 Pemahaman membaca teks Bahasa Inggris
9	Pengelola Keprotokolan	1	Kemampuan Umum: 1 Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Negara dalam layanan keprotokolan dalam peraturan perundang-undangan

NO	JABATAN	MATERI POKOK	
		2	Pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan peraturan perundang-undangan
		3	Pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan yang berkaitan dengan administrasi/protokoler berdasarkan peraturan perundang-undangan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pelayanan keprotokolan terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		2	Pelayanan keprotokolan terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		3	Pelayanan keprotokolan terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		4	Pelayanan keprotokolan terkait tata cara protokol internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		5	Protokol Kepresidenan dan Pejabat Negara/Presiden/Pemerintah lainnya
10	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1	Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa
		2	Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK
		3	Penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan
		4	Perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan
		5	Perumusan organisasi pengadaan
		6	Pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan
		7	Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi
		8	Reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa
		9	Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggah
		10	Penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah
		11	Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan/atau spesifik
		12	Risiko pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
		13	Data dan informasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
		14	Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
		15	Pembentukan tim pengelola kontrak
		16	Pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
		17	Serah terima hasil pengadaan barang/jasa pemerintah
		18	Evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
		19	Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk kuitansi, bukti
		20	Risiko pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
		21	Identifikasi dan pengumpulan bahan/data/informasi untuk melakukan persiapan dan pengendalian kontrak, serta evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa
		22	Perencanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan persiapan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		23	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		24	Pengawasan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		25	Risiko pengadaan barang/jasa secara swakelola
		26	Identifikasi dan pengumpulan bahan, data, dan informasi dalam pengadaan barang/jasa secara swakelola
11	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
			Peraturan terkait jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan turunannya, termasuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023
			Kompetensi Khusus:
		1	Analisis pengembangan teknologi pembelajaran
		2	Perancangan pengembangan sumber belajar
		3	Pengembangan sumber belajar berbasis aneka sumber

NO	JABATAN	MATERI POKOK	
		4	Penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
		5	Difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran
		6	Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
12	Pengendali Konten Internet		Kemampuan Umum:
		1	Pembuatan Konten Digital
		2	Pemasaran Media Sosial
		3	Pemasaran Konten
		4	Blogging dan Penulisan Online
		5	Video Marketing dan Produksi
		6	Podcasting
		7	E-commerce dan Perdagangan Online
		8	Strategi Media Sosial
		9	Iklan Online dan PPC (Pay-Per-Click)
		10	Manajemen Reputasi Online
		11	Penggunaan Media Sosial untuk Bisnis
		12	Keterlibatan Pengguna dan Komunitas Online
		13	Email Marketing
		14	Personal Branding di Internet
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengoptimalan Mesin Pencari (SEO)
		2	Desain Web dan Pengembangan
		3	Analistik Web dan Pengukuran Data
		4	Keamanan dan Privasi Online
		5	Hak Cipta dan Lisensi Konten Digital
		6	Grafis dan Desain Visual untuk Web
		7	Pengembangan Aplikasi Mobile
		8	Strategi Konten Multiplatform
		9	Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) di Web
		10	Blockchain dan Implikasinya pada Konten Web
		11	Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pembuatan Konten
		12	Etika dan Hukum dalam Konten Digital
		13	Analisis Sentimen pada Media Sosial
		14	Internet of Things (IoT) dan Konten Web
13	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Pengantar Ilmu Hukum
		2	Konsensus Kebangsaan
		3	Pengantar Filsafat Hukum
		4	Teori Hukum
			Kemampuan Khusus
		1	Data dan bahan terkait Program Legislasi Nasional, di luar Program Legislasi Nasional, Program Legislasi Daerah, di luar Program Legislasi Daerah, daftar kumulatif terbuka, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan, atau di luar usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan
		2	Data dan bahan terkait analisis urgensi Instrumen Hukum lainnya
		3	Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan
		4	Data dan bahas terkait proses merumuskan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
		5	Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
			Data dan bahan terkait penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

NO	JABATAN	MATERI POKOK	
		6	perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung
		7	Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
14	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Ruang lingkup humas
		2	Etika kehumasan
			Kemampuan Khusus:
		1	Manajemen isu
		2	Manajemen komunikasi
		3	Karakteristik media
		4	Media baru
		5	Komunikasi massa
		6	Publisitas
		7	Penulisan kehumasan
		8	Kegiatan-kegiatan humas
		9	Komunikasi organisasi
		10	Komunikasi interpersonal
		11	Teori komunikasi
		12	Model komunikasi
		13	Metode penelitian komunikasi
		14	Audit komunikasi
15	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	IT Enterprise
		2	Manajemen Layanan TI
		3	Pengelolaan Data
		4	Manajemen Risiko TI
		5	Infrastruktur TI
		6	Sistem Informasi dan Multimedia
16	Pranata Komputer Terampil	1	Manajemen Layanan TI
		2	Pengelolaan Data
		3	Infrastruktur TI
		4	Sistem Informasi dan Multimedia
17	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil		Kemampuan Umum:
		1	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2	PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3	PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
		4	PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		5	Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
			Kemampuan Khusus:
		1	Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur
		2	Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN
		3	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
		4	Pengadaan ASN
		5	Pangkat dan Jabatan ASN
		6	Pengembangan Karier ASN
		7	Pola Karier ASN
		8	Promosi ASN

NO	JABATAN	MATERI POKOK	
		9	Mutasi ASN
		10	Penugasan ASN
		11	Pengembangan Kompetensi ASN
		12	Penilaian Kinerja ASN
		13	Disiplin ASN
		14	Penghargaan ASN
		15	Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN
		16	Pemberhentian ASN
		17	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
		18	Perlindungan ASN
		19	Cuti ASN
20	Sistem Informasi ASN		
18	Pustakawan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Pembudayaan Kegemaran Membaca
		2	Sejarah Dunia Pustakawan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengembangan Koleksi Perpustakaan
		2	Pengorganisasian Bahan Perpustakaan dan Pengetahuan
		3	Pengembangan Sistem Kepustakawanan
		4	Pelayanan Informasi dan Referensi
		5	Promosi Perpustakaan
6	Pengembangan Literasi Informasi		
19	Widyaiswara Ahli Pertama	1	Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
		2	Pembelajaran Orang Dewasa
		3	Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan
		4	Media Pembelajaran
		5	Metode Pembelajaran
		6	E-learning/Pembelajaran Daring
		7	Teknik Komunikasi dalam Pembelajaran
		8	Praktik Mengajar/Micro Teaching
		9	Penyusunan Kurikulum
		10	Penyusunan Modul Pelatihan